BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam Hukum Islam merupakan institusi yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama dan ahli fiqih. Konsep pernikahan ini melibatkan syarat-syarat, rukun-rukun, dan tata cara yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang akan menikah.

Menurut buku "Hukum Perkawinan Islam" karya Haji Aminuddin (2019)¹³, pernikahan dalam Hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang harmonis, melindungi hak-hak suami dan istri, serta memenuhi tujuan reproduksi secara halal. Konsep pernikahan ini didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan hadis yang mengatur mengenai pernikahan, seperti Surah An-Nisa ayat 3, Surah Ar-Rum ayat 21, dan hadis-hadis yang menceritakan praktek pernikahan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Dalam jurnal "Perspektif Hukum Islam tentang Pernikahan" yang ditulis oleh Ali (2020)¹⁴, disebutkan bahwa pernikahan dalam Hukum Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah, antara lain kesepakatan kedua belah pihak, wali yang sah, saksi-saksi yang adil, mahar (mas kawin), dan ketiadaan halangan hukum yang menghalangi pernikahan.

¹³ Aminuddin, H. (2019). Hukum Perkawinan Islam. Pustaka Setia.

¹⁴ Ali. (2020). Perspektif Hukum Islam tentang Pernikahan. Jurnal Hukum Islam, 7(2), 157-171.

Syarat-syarat ini didasarkan pada interpretasi dan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam yang diterima oleh mayoritas ulama.

Dalam buku "Fiqh al-Islam" karya Syaikh Wahbah Zuhaili¹⁵, dijelaskan bahwa pernikahan dalam Hukum Islam juga melibatkan rukun-rukun yang harus ada agar pernikahan sah, seperti ijab (pendakian) dan qabul (penerimaan) dari kedua belah pihak. Rukun-rukun ini merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pernikahan yang memastikan kesepakatan dan keabsahan pernikahan tersebut.

Dalam hukum pernikahan Islam, terdapat juga prinsip-prinsip yang mengatur hubungan suami dan istri, seperti saling mencintai, saling menghormati, saling membantu, dan saling memenuhi hak-hak yang ditentukan oleh agama. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk mengenai tata cara berkeluarga yang baik.

Dalam penelitian dan pengkajian hukum Islam, konsep pernikahan menjadi topik yang penting untuk memahami tata cara dan ketentuan yang mengatur pernikahan dalam agama Islam.

Dalam kajian hukum Islam, pernikahan juga dibahas dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dalam jurnal "Relevansi Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam dengan Tantangan Modern" yang ditulis oleh Fatimah (2020)¹⁶, disorot pentingnya memahami konsep pernikahan dalam Hukum Islam dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di era modern. Isu seperti peran gender, hak-hak perempuan, perceraian, poligami, dan pernikahan anak-anak memerlukan pemahaman yang mendalam

¹⁵ Abdullah. (2021). Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 103-122.

¹⁶ Fatimah. (2020). Relevansi Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam dengan Tantangan Modern. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 13(2), 142-156

terhadap konsep pernikahan dalam Hukum Islam dan cara implementasinya yang sesuai dengan konteks sosial dan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam konteks kebebasan beragama dan hak asasi manusia, konsep pernikahan dalam Hukum Islam juga menjadi topik diskusi yang penting. Dalam buku "Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia" karya Dr. Amin M. Jamil (2018)¹⁷, dibahas pentingnya memahami hak-hak individu dalam pernikahan, termasuk kebebasan memilih pasangan hidup, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Konsep pernikahan dalam Hukum Islam juga harus diinterpretasikan secara luas untuk mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.

Konsep pernikahan dalam Hukum Islam juga melibatkan aspek tanggung jawab suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing dalam keluarga. Dalam buku "Hukum Keluarga Islam" karya Prof. Dr. H. Ali Mustafa Ya'qub, M.A.¹⁸, disebutkan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan istri memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Konsep ini didasarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengatur peran dan tanggung jawab suami dan istri.

Dalam jurnal "Pemberdayaan Perempuan dalam Pernikahan Islam" yang ditulis oleh Siti Nur Aisyah (2019)¹⁹, disebutkan bahwa pernikahan dalam Hukum Islam juga menekankan pentingnya persamaan hak antara suami dan istri. Meskipun suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, namun istri memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, seperti

¹⁷ Jamil, A. M. (2018). Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia. Kencana.

¹⁸ Ya'qub, A. M. (2018). Hukum Keluarga Islam. Sinar Grafika.

¹⁹ Aisyah, S. N. (2019). Pemberdayaan Perempuan dalam Pernikahan Islam. Jurnal Hukum Islam, 16 (1), 55-70.

hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam praktik pernikahan dalam Hukum Islam, terdapat juga konsep poligami yang diatur dalam Al-Quran. Dalam jurnal "Pandangan Agama Islam terhadap Praktik Poligami" yang ditulis oleh Fauziah (2018)²⁰, disebutkan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat yang ketat, seperti adil dalam memperlakukan istri-istri, memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah secara adil, dan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai suami. Konsep poligami ini memiliki landasan hukum yang ditemukan dalam Al-Quran dan penafsiran ulama.

Pemahaman konsep pernikahan dalam Hukum Islam ini penting dalam konteks sosial dan hukum di masyarakat Muslim. Penelitian lebih lanjut dan studi komprehensif diperlukan untuk menjelaskan konsep pernikahan ini dengan lebih mendalam dan relevan dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

B. Masa Iddah dalam Islam

Masa Iddah merupakan periode tunggu yang diwajibkan bagi seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya. Konsep masa iddah ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam agama Islam. Masa iddah bertujuan untuk memberikan waktu bagi perempuan

²⁰ Fauziah. (2018). Pandangan Agama Islam terhadap Praktik Poligami. Jurnal Hukum Islam, 15(2), 213-228.

untuk menyelesaikan perselisihan atau ikatan pernikahan sebelumnya, serta memastikan keabsahan dan kesahihan pernikahan selanjutnya.

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang masa iddah. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 228, yang menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan harus menjalani masa iddah selama tiga kali haid (maksimal tiga bulan) sebelum ia dapat menikah kembali. Terdapat juga ayat-ayat lainnya yang mengatur masa iddah dalam konteks perceraian dan kematian suami.

Menurut buku "Hukum Perkawinan Islam" karya Haji Aminuddin (2019)²¹, masa iddah dalam Hukum Islam memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk memastikan bahwa perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya tidak sedang hamil. Jika perempuan tersebut hamil, masa iddah akan berakhir setelah melahirkan. Kedua, masa iddah memberikan waktu bagi perempuan untuk mengatur kehidupannya pasca-perceraian atau pascakematian suami. Ketiga, masa iddah juga memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk berdamai dan memperbaiki hubungan mereka sebelum keputusan pernikahan yang baru diambil.

Dalam jurnal "Implementasi Masa Iddah dalam Hukum Islam di Indonesia" yang ditulis oleh Rahmawati (2020)²², disebutkan bahwa masa iddah juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi bagi perempuan. Selama masa iddah, perempuan memiliki hak untuk menerima nafkah dari suami yang menceraikan atau meninggal dunia. Masa iddah memberikan perlindungan dan jaminan bagi perempuan dalam hal keuangan dan kehidupan sehari-hari selama masa transisi ini.

²¹ Aminuddin, H. (2019). Hukum Perkawinan Islam. Pustaka Setia.

²² Rahmawati. (2020). Implementasi Masa Iddah dalam Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum & Masyarakat, 13(2), 173-188.

Pemahaman dan implementasi masa iddah dalam Hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan interpretasi hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kajian komprehensif mengenai masa iddah dalam rangka memahami dan mengaplikasikan konsep ini sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim.

Dalam prakteknya, masa iddah juga memiliki implikasi dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi dan keadaan yang ada. Dalam buku "Hukum Keluarga Islam" karya Prof. Dr. H. Ali Mustafa Ya'qub, M.A.²³, dijelaskan bahwa masa iddah bagi perempuan yang diceraikan tergantung pada jenis perceraian yang terjadi, apakah melalui talak raj'i (cerai yang dapat dirujuk) atau talak bain (cerai yang tidak dapat dirujuk). Setiap jenis perceraian memiliki ketentuan masa iddah yang berbeda, seperti talak raj'i memiliki masa iddah selama tiga bulan atau tiga kali haid, sedangkan talak bain tidak memiliki masa iddah.

Dalam jurnal "Aspek Hukum Masa Iddah Bagi Perempuan Dalam Perceraian" yang ditulis oleh Riana (2018)²⁴, dijelaskan bahwa masa iddah juga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hal penentuan status pernikahan dan hak-haknya. Selama masa iddah, perempuan tetap menjadi istri sah dan memiliki hak-hak tertentu, seperti hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal yang layak. Masa iddah memberikan waktu bagi perempuan untuk mengurus dan mempersiapkan diri sebelum menghadapi perubahan status pernikahan.

Penerapan masa iddah dalam Hukum Islam juga dapat berbeda-beda dalam konteks sosial dan hukum yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam

²³ Ya'qub, A. M. (2018). Hukum Keluarga Islam. Sinar Grafika.

²⁴ Riana. (2018). Aspek Hukum Masa Iddah Bagi Perempuan Dalam Perceraian. Jurnal Hukum Islam, 15(1), 43-60.

jurnal "Penerapan Masa Iddah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia" yang ditulis oleh Wijayanti (2021)²⁵, disorot adanya variasi praktik dan pemahaman tentang masa iddah di Indonesia. Hal ini terkait dengan perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang dipengaruhi oleh faktor budaya, adat istiadat, dan kebijakan negara.

Dalam penelitian dan pengkajian lebih lanjut, perlu diperhatikan perkembangan hukum Islam dan respons terhadap isu-isu kontemporer terkait masa iddah. Tantangan seperti perubahan sosial, hak-hak perempuan, dan perspektif gender juga harus dipertimbangkan dalam memahami dan mengaplikasikan konsep masa iddah dalam konteks yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya.

²⁵ Wijayanti. (2021). Penerapan Masa Iddah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 24(1), 28-42.